

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat khususnya pada negara yang sedang berkembang, secara umum kemiskinan senantiasa menjadi fokus utama kelompok akademisi dan praktisi. Beberapa hipotesis, ide, dan pendekatan senantiasa dilakukan untuk mengubah tirai dan rahasia kemiskinan. Kemiskinan merupakan keterbatasan seseorang untuk mencukupi standar kehidupan. Pada dasarnya negara berkembang menghitung tingkat kemiskinan menggunakan perbandingan pendapatan ataupun pengeluaran negara dengan garis kemiskinan. Menurut Chriwardani (2005) kemiskinan tidak sebatas kurangnya pendapatan dan uang, namun termasuk juga kurangnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan dalam menjalani gaya hidup tertentu.

Menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kemiskinan adalah gambaran keadaan negara yang berhubungan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan pokok. Adapun indikator kemiskinan itu sendiri meliputi buta huruf, kurang gizi, pakaian tidak layak, kesehatan buruk, ketidakberdayaan, dan rumah tidak layak.

Masalah kemiskinan adalah permasalahan kompleks dan multifaset (Nasir, 2008). Penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah penghasilan yang rendah, tingginya pengangguran, dan indeks pembangunan manusia rendah.

Kategori miskin adalah pada saat tidak mampu memenuhi kebutuhan atau tidak berpendapatan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi banyak negara berkembang. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan seperti ketimpangan penghasilan atau disparitas ekonomi dan jumlah orang miskin atau hidup (Endrayani dan Dewi, 2016). Dalam kemiskinan, di bawah garis kemiskinan (poor line), tingkat pendidikan yang rendah, umumnya memulai dan memperpanjang kenaikan harga, dan meningkatnya pengangguran. Ketika faktor-faktor ini mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, Ragar Nurkse (2006) karya Mudrajad Kuncoro menerima pendapatan yang lebih rendah karena keterbelakangan, kelemahan pasar, dan modal sebagai sumber penurunan produktivitas. Pendapatan rendah berdampak pada minimnya investasi dan tabungan yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan.

Kemiskinan diartikan sebagai standar hidup rendah yang diketahui berdasarkan kurangnya materi seseorang daripada taraf hidup orang lain secara azim pada masyarakat umum. Masalah kemiskinan begitu kompleks dan multifaset sehingga dapat menghindari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Kemiskinan adalah aspek panas dari pemerintah Indonesia. Pemerintah membuat berbagai kegiatan dan program pembangunan untuk menyelesaikan kemiskinan, dimana pembangunan tersebut dijalankan dengan sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas setiap daerah. Tujuan pembangunan nasional ditentukan dengan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun indikator dari pembangunan nasional yaitu menurunnya kemiskinan.

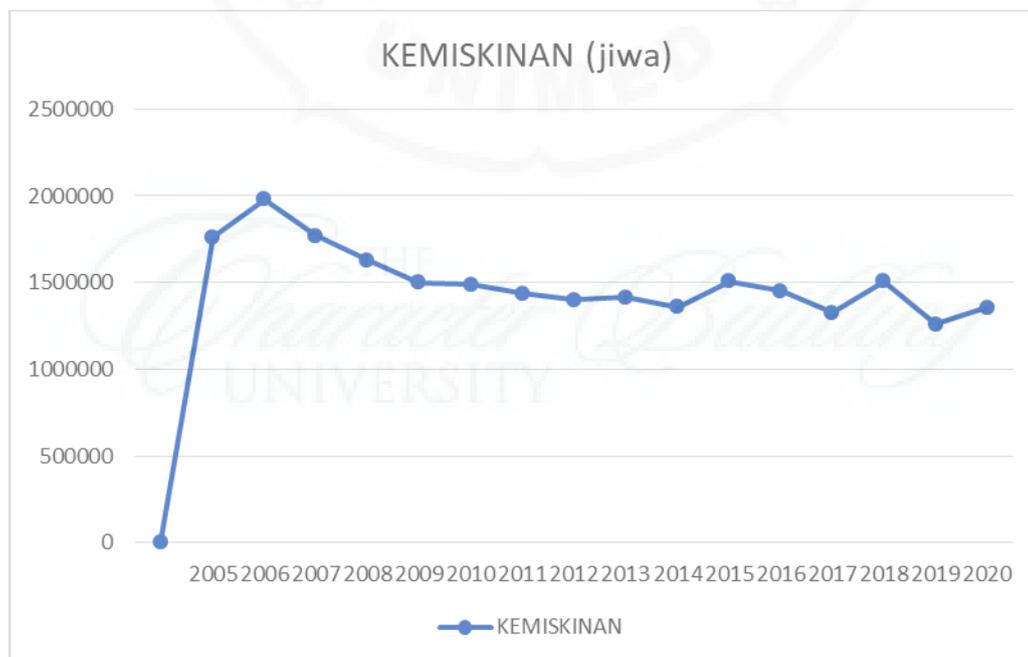
Secara umum kemiskinan dapat melahirkan berbagai permasalahan sosial seperti bertambahnya gepeng (gelandangan dan pengemis), anak jalanan yang terkena razia, anak putus sekolah, dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya ekonomi keluarga atau kemiskinan yang menjadi gambaran atas indeks pembangunan manusia rendah. Semakin bertambah anak di bawah umur berprofesi sebagai pengemis dan memutuskan putus sekolah menjadi salah satu bukti nyata kemiskinan terjadi di setiap negara.

Pemprov Sumatera Utara sepenuhnya menyadari pembangunan merupakan usaha nyata memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui kesadaran tersebut menjadikan pemerintah berusaha keras untuk melakukan pembangunan di berbagai daerah, khususnya yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dengan maksud dapat menurunkan kemiskinan tersebut. Dengan demikian pembangunan nasional ditetapkan pada efektivitas menurunkan kemiskinan (Simatupang & Saktyanu, 2003).

Kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Sejauh ini jumlah kemiskinan di Sumatera Utara terus mengalami fluktuasi, artinya kualitas hidup masyarakatnya masih rendah. Namun demikian ada juga daerah dengan tingkat kemiskinan rendah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dan minimnya optimalisasi penggunaan sumber daya menjadikan sebagian masyarakat miskin semakin terbelakang. Selama tahun 2006 – 2012 diketahui untuk jumlah penduduk miskin memiliki kecenderungan berkurang, dan di tahun 2014 jumlah penduduk miskinnya lebih rendah dari tahun 2013 dan 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah penduduk

miskin kembali menurun, hal ini dikarenakan taraf hidup masyarakat bertambah namun untuk penetapan garis kemiskinannya dikurangi. Berkurangnya kemiskinan sepanjang tahun khususnya pada tiga tahun sebelumnya dikarenakan adanya inflasi pada Desember 2016 hanya 0,19 dimana pada saat itu untuk komoditas penting menjadi stabil dan menguntungkan masyarakat kecil, pasokan beras cukup baik sehingga angka kemiskinannya menurun. Pengangguran di beberapa daerah berkurang yang menjadikan kemiskinan semakin berkurang karena pengalokasian dana desa menjadi terakomodir.

Selama tahun 2019 – 2020, adanya dampak pandemi covid 19 dan minimnya kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara. Ketimpangan pembangunan dan tidak maksimalnya penggunaan sumber daya menjadi bagian kecil masalah kemiskinan yang terjadi di Sumatera Utara. Berikut merupakan jumlah penduduk miskin selama 2005 – 2020 di Sumatera Utara:



Gambar 1.1 Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kemiskinan berpengaruh pada PDRB (produk domestik regional bruto) Dilihat dari gambar 1.1 grafik kemiskinan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan akibat pandemi covid19. dilihat grafik PDRB tahun 2019- 2020 juga mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan prediksi . hal tersebut adanya pandemi covid19 bersifat global. yang paling terdampak adalah masyarakat yang bekerja atau berusaha disektor industri akibat terhambatnya produksi, sektor jasa transportasi akibat kebijakan PSBB dan ajuran tinggal dirumah. Dampak ini juga semakin terasa di sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Semua negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi kemiskinan. Di banyak negara di dunia, pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting untuk pengurangan kemiskinan. Namun, situasi di negara berkembang seperti Indonesia yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi, diiringi dengan masalah peningkatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai dengan memperluas kesempatan kerja (mengurangi pengangguran) dan memaksimalkan investasi produktif di berbagai sektor ekonomi.

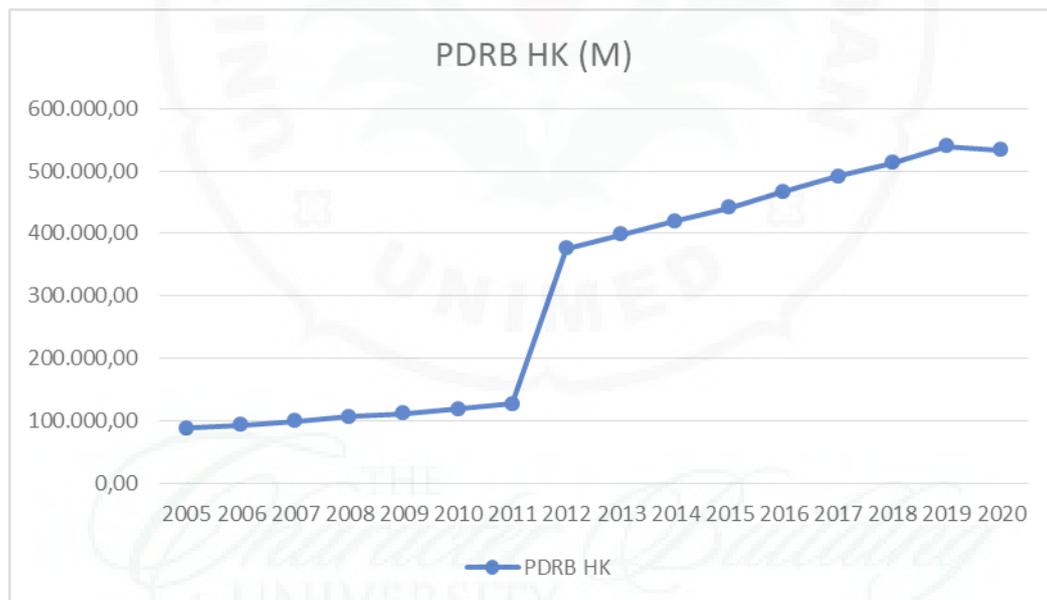
Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produk domestik bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dari perspektif ekonomi. Perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berdampak positif terhadap isu penting kemiskinan. PDRB

sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin menonjol potensi sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Bahkan, PDRB mempengaruhi jumlah angkatan kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai PDRB, jumlah nilai tambah semua unit ekonomi di suatu wilayah meningkat. Peningkatan produksi dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (mengurangi pengangguran) dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hastina Februari dan Nurwani (2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh buruk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah (2003-2010). Hal ini karena PDRB merupakan ukuran kemakmuran daerah. Semakin tinggi PDRB, maka semakin tinggi pula penjumlahan nilai tambah seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan produksi dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (mengurangi pengangguran) dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut (Sukirno, 2000:14), Laju pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak berarti seluruh penduduk di wilayah tersebut sejahtera. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjelaskan penurunan kemiskinan yang signifikan. Hal ini karena pembangunan ekonomi tidak diukur semata-mata dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB), tetapi perlu memperhatikan siapa yang menikmati pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) dengan harga konstan, menjelaskan salah satu faktor untuk mengidentifikasi besarnya nilai tambah oleh seluruh unit usaha di wilayah tersebut, atau secara umum, memberikan gambaran kinerja makroekonomi wilayah., atau secara umum memberikan

gambaran kinerja ekonomi makro suatu wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan informasi PDRB Sumatera Utara 2005-2020, Sumatera utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. dan tahun 2011 hingga 2019, bahkan mengalami kenaikan yang tajam di tahun 2012. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistika, kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2012 sebesar 375.924,14 M Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, antara lain : industri manufaktur, pertanian dan perdagangan dan lain-lain. Berikut gambar 1.2 PDRB Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 PDRB Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam perspektif lain penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan pembangunan manusia. Akan tetapi dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia terjadi ketidak selarasan dengan data kemiskinan dimana data kemiskinan yang dapat

dilihat dari gambar 1.1 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan IPM yang tinggi tidak menjamin semua orang di daerah akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia erat kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Semakin baik kesehatan dan pendidikan , semakin mudah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan Anda. Pendidikan salah satunya, sangat penting untuk menunjang pembangunan dan kemajuan negara. Negara dikatakan mengalami kemajuan dalam segala hal, tidak lepas dari peran pendidikan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi maupun pertanian. Hal ini karena orang-orang terpelajar memberikan kontribusi positif bagi negara. Orang-orang terdidik bermanfaat bagi orang lain dengan berbagi informasi dan melakukan hal-hal baru. Kesehatan yang lebih baik juga memiliki efek positif pada waktu orang di tempat kerja dan sekolah. Dalam arti luas, berinvestasi dalam modal manusia berarti pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) adalah mengentaskan kemiskinan yang berlaku di seluruh dunia. Ari Kristin Prasetyoningrum (2018) menyatakan bahwa IPM memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan IPM adalah kehidupan yang layak, karena IPM meningkatkan produktivitas kerja manusia dan meningkatkan pendapatan.

Menurut (Ginting, 2008) Indonesia lebih identik dengan penurunan kemiskinan dalam hal pembangunan manusia. Melakukan investasi kesehatan dan pendidikan lebih masuk akal untuk masyarakat miskin, hal ini dikarenakan masyarakat miskin memiliki asset utama berupa tenaga kerja manual.

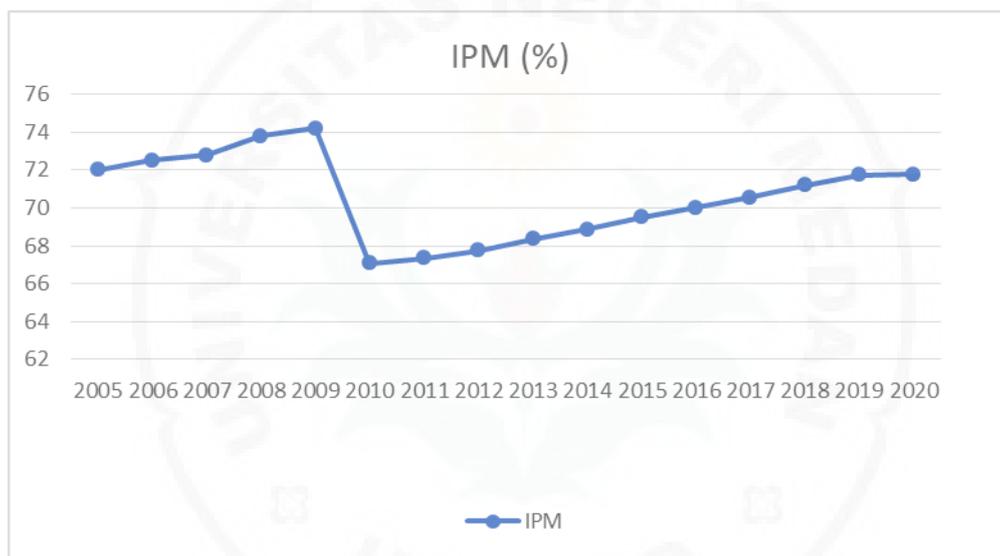
Kualitas hidup seseorang dapat diketahui melalui IPM yang dihitung berdasarkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketiganya diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak terlepas dari capaian pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi demi tercapainya ketertiban masyarakat.

Pemerintah sejatinya memerlukan SDM berkualitas untuk menjadi modal dasar pembangunan. Adapun untuk menghasilkan SDM berkualitas dibutuhkan usaha yang maksimal untuk meningkatkan SDM.

IPM membahas bahwa penduduk suatu daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat dari hak pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM juga dapat menjadi klasifikasi kategori negara maju, berkembang, ataupun terbelakang.

Selain itu, pembangunan ekonomi dapat dikatakan efektif jika suatu daerah/kabupaten tidak hanya siap untuk meningkatkan pembangunan finansial, tetapi mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang disebut IPM. IPM yang rendah ataupun tinggi mempengaruhi tingkat efisiensi masyarakat. Untuk situasi ini, semakin rendah IPM, semakin rendah tingkat efisiensi penduduk, dan ini akan mempengaruhi upah yang lebih rendah. Sebaliknya, semakin tinggi IPM, semakin tinggi efisiensi dan akan mendorong tingkat pembayaran menjadi lebih tinggi. Persoalan yang terjadi adalah IPM setiap daerah itu unik. IPM merupakan salah satu penanda penting bagi suatu negara atau daerah. HDI menggabungkan panjang hidup, pelatihan dan kesejahteraan, dan cara hidup yang adil. IPM dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur untuk mengukur

klasifikasi suatu negara, baik yang sudah mapan, yang berkreasi, maupun yang belum matang. IPM menjadi ukuran keberhasilan kualitas hidup manusia yang menjadi tolok ukur kinerja seseorang pada setiap daerah. Diketahui tahun 2016 untuk IPM Sumatera Utara meningkat hingga 70,18 dari tahun 2017 yang hanya 69,51. Berikut gambar 1.3 IPM Sumatera Utara:



Gambar 1.3 IPM Sumatera Utara
Sumber : Badan Pusat Statistik

Kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap investasi. Dilihat dari gambar 1.1 grafik kemiskinan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan akibat pandemi covid19. pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan prediksi . Hal ini terjadi karena dampaknya bersifat global, sehingga kebijakan blokade negara-negara yang sebelumnya terkena dampak telah mempengaruhi perdagangan internasional, penarikan, atau penundaan investasi. Situasi ini menahan sebagian besar kegiatan ekonomi. Peranan investasi di Sumatera Utara memegang peranan penting dalam membangun perekonomian yang maju, karena sinergi investasi berpeluang untuk meningkatkan

produktivitas, mendorong pertumbuhan, menurunkan kemiskinan, dan menambah penghasilannya masyarakat.

Di sisi lain, faktor investasi berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Aktivitas investasi baik fisik maupun non fisik seperti yang dilakukan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Tempat berinvestasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM yang ditujukan dengan meningkatnya kemampuan dan pengetahuan. Peningkatan tersebut dapat melahirkan produktivitas yang jauh lebih baik. Dengan mempekerjakan pekerja yang sangat produktif, kami akan dapat mencapai lebih banyak hasil, sehingga gaji dan upah yang diberikan lebih besar. Adapun untuk produktivitas tenaga kerja yang buruk dapat terjadi karena akses kesehatan dan pendidikan buruk. Secara umum orang yang lebih produktif mendapatkan memiliki kesejahteraan cukup dan bukan termasuk dalam kategori miskin. Yolanda Pateda, Vecky A.J. Masinambow, Tri Oldy Rotinsulu (2016) menyatakan investasi berpengaruh negatif pada kemiskinan. Dengan kata lain, pada saat investasi mengalami peningkatan, maka untuk kemiskinan akan menurun. Adapun untuk pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan tidak signifikan pada kemiskinan di Gorontalo, dan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kemiskinan di Gorontalo.

Kegiatan investasi atau menanamkan modal pada perusahaan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi akan bertambah dan lapangan pekerjaan semakin terbuka, sehingga pendapatan nasional juga akan meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga bertambah

(Sukirno, 2000). Kegiatan investasi mampu meningkatkan persediaan barang maupun jasa yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian, hal ini sejalan dengan ketersediaan barang maupun jasa mampu menghasilkan kegiatan produksi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi.

Dilihat dari Gambar 1.4 terlihat sangat jelas bahwa untuk Sumatera Utara, realisasi investasi dalam bentuk PMDN dan PMA tahun 2017 meningkat signifikan sebesar Rp. 31.981,10 M dan menurun ditahun 2019-2020. Dapat kita lihat gambar grafik investasi tahun 2005-2020.



Gambar 1.4 Investasi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum pembangunan nasional tidak selalu adil sehingga pertumbuhan ekonominya tidak mudah diwujudkan, sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi secara perlahan di beberapa daerah pada waktu yang bersamaan. Karena kurangnya sumber daya, daerah tersebut belum mengalami perkembangan dan kemajuan. Selain itu, ketersediaan pengalokasian investasi yang tidak merata di beberapa daerah dan

perbedaan IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sesuai dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “PENGARUH PDRB, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi permasalahan berikut:

1. PDRB Harga Konstan yang mengalami peningkatan yang lambat dari tahun ke tahun dan menurun ditahun 2019-2020.
2. IPM yang mengalami peningkatan yang lambat terutama pada tahun 2019- 2020.
3. Investasi yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun
4. Penduduk miskin yang mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama di tahun 2019 ke 2020.

1.3 Batasan Masalah

Bagian ini dilakukan untuk menentukan batasan permasalahan yang mampu mengidentifikasi berbagai berbagai faktor yang sesuai dengan ruang lingkup permasalahan saja. Berikut batasan-batasan permasalahan yang penulis tetapkan:

1. Menggunakan data PDRB harga konstanta Sumatera Utara;
2. Jumlah keseluruhan IPM Sumatera Utara;
3. Data investasi baik dalam maupun luar negeri Sumatera Utara;
4. Jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditetapkan, berikut adalah rumusan permasalahan penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, IPM dan Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis:

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Sumatera Utara;
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Utara;
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara;
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia, dan investasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara secara bersamaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya memberikan kebermanfaatan untuk penulis ataupun pihak terkait lainnya berupa:

1. Saran atau masukan dalam menentukan kebijakan terkait rencana pembangunan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan; dan
2. Menambah wawasan serta kemampuan berpikir penulis mengenai penerapan teori yang diteliti.

